

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perubahan dalam bidang lain seperti pendidikan, teknologi, kemahiran tenaga kerja, dan kemakmuran masyarakat. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah adalah proses di mana berbagai faktor, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, dan lain-lain, berinteraksi satu sama lain. Melaksanakan pembangunan itu sendiri dengan para pekerja, terutama dengan tenaga kerja adalah salah satu komponen yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan. Akibatnya, peran manusia dalam mengelola pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa manusia adalah tenaga kerja, pelaku pembangunan, dan konsumen dari pembangunan ekonomi itu sendiri.²

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan peningkatan kesempatan kerja adalah dua indikator keberhasilan ekonomi pembangunan di negara berkembang. Tujuan dari proses pembangunan adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi berbagai kebutuhan dasar manusia, meningkatkan standar hidup (melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendidikan), dan meningkatkan ekonomi dan

² Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm.421

sosial. Perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara yang bergantung pada kuantitas penduduk yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh suatu ekonomi untuk mendorong kegiatan ekonomi. Akibatnya, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan tingkat penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kemakmuran masyarakat adalah semua hasil dari pertumbuhan ekonomi.³

Tenaga kerja adalah jumlah orang di usia kerja (16-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk di seluruh negara yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan tenaga kerja dan ingin berpartisipasi dalam produksi tersebut. Selain itu, Murti berpendapat bahwa tenaga kerja adalah orang-orang yang menawarkan kemampuan dan keterampilan mereka untuk memproduksi barang dan jasa supaya perusahaan dapat memperoleh keuntungan, dan seorang pekerja akan dibayar sesuai dengan kemampuan mereka.⁴ Tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu negara, tingkat

³ Ibid, hlm. 422

⁴ Mulyadi Sabri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 71

upah, besar keuntungan perusahaan, dan tingkat investasi perusahaan.⁵

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 11100 Bujur Timur – 11404' Bujur Timur dan 7012'Lintang Selatan – 8048"Lintang Selatan , dengan luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km². Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara enam provinsi di Pulau Jawa. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang besar. Provinsi ini merupakan salah satu pusat industri di Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, tekstil, dan elektronik. Selain itu, sektor pertanian juga berperan penting dalam ekonomi Jawa Timur dengan komoditas unggulan seperti padi, tebu, dan jagung. Suku bangsa yang dominan di Jawa Timur adalah suku Jawa. Namun, terdapat juga suku-suku bangsa lain yang tinggal di provinsi ini seperti Madura, Osing, dan Tengger. Bahasa yang umum digunakan di Jawa Timur adalah Bahasa Jawa. Namun, Bahasa Indonesia juga umum digunakan terutama dalam komunikasi formal dan di perkotaan. Dapat dilihat jumlah penduduk di Jawa timur dibawah ini

⁵ Harnida Gigih Aryanti, Inung Oni Setiadi dkk., *Ketenagakerjaan*, (Klaten : Cempaka Putih, 2019), hlm. 29 - 30

Tabel 1. 1
Jumlah penduduk Indonesia 2023

No	Provinsi	Jumlah
1.	Jawa Barat	45 643 838
2.	Jawa Timur	41 416 407
3.	Jawa Tengah	37 540 962
4.	Sumatera Utara	15 386 640
5.	Banten	12 431,39

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 Jawa Timur

Di Indonesia yang masih menjadi masalah utama adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ini muncul dikarenakan adanya kesenjangan dalam mendapatkannya atau masalah ketenagakerjaan ini bisa terjadi karena tidak adanya keberhasilan dalam menyeimbangkan lapangan kerja dengan laju pertumbuhan output perusahaan. Ketenagakerjaan adalah aspek yang penting untuk kehidupan manusia karena di dalamnya terdapat dimensi sosial serta ekonomi. Menurut data diatas Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang banyak. Penduduk yang bertambah akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja dan memungkinkan penambahan peningkatan produksi. Hal ini disebabkan jika pertumbuhan penduduk naik maka akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Jika permintaan barang dan jasa naik maka tenaga kerja yang digunakan dalam produksi akan semakin meningkat.⁶

Jawa Timur tidak hanya memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang cukup banyak. Potensi ekonomi di Jawa Timur mencakup sektor industri pengolahan,

⁶ *Ibid.*, hlm. 287

perdagangan perhotelan, dan pertanian. Potensi ekonomi tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Sektor industri pengolahan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi yang berarti sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan mengingat jumlah penduduk di Jawa Timur yang cukup banyak.

Tabel 1. 2
Jumlah Industri Skala Mikro di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah
1.	Jawa Barat	632.921
2.	Jawa Timur	833.726
3.	Jawa Tengah	808.293
4.	Sumatera Utara	117.806
5.	Banten	97.303

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023 Jawa Timur

Dapat dilihat dari data diatas provinsi Jawa Timur memiliki jumlah sektor industri yang banyak dari lima provinsi tersebut. Industri memiliki peran sebagai sektor pemimpin (leading sector) dalam kaitannya dengan keberhasilan pembangunan. Dengan pembangunan industri, diharapkan sektor tersebut dapat mendorong pembangunan sektor lainnya.⁷ Pertumbuhan industri yang cukup cepat akan mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan serta permintaan masyarakat. Adanya peningkatan dan daya beli itu menunjukkan bahwa perekonomian tersebut tumbuh dan berkembang.

⁷ Herawati Purwasih, *Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo*, Edisi Yudisium ,Vol. 5 No. 1 ,2017,hlm. 3

Secara teori semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu sektor, maka semakin tinggi pertumbuhan kesempatan kerja sektor tersebut. Dengan kata lain hubungan sektor industri dengan penyerapan tenaga kerja sangat erat sekali. Semakin baik meningkat pertumbuhan sektor industri, maka semakin meningkat jumlah penyerapan tenaga kerja.⁸ Namun disisi lain jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat tetapi tidak di imbangi dengan adanya jumlah lapangan yang tersedia atau jumlah angkatan tenagakerja yang terserap maka akan menimbulkan jumlah tingkat pengangguran semakin meningkat

Tabel 1. 3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2023 (persen)

No	Tahun	Jumlah
1.	Jawa Timur	4,88
2.	DI Yogyakarta	3,24
3.	Bali	1,87
4.	Sulawesi barat	3,02
5.	Bengkulu	3,17

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur

Dapat dilihat dari data diatas tingkat pengangguran terbuka dari beberapa provinsi di Indonesia. Jawa Timur ini memiliki tingkat pengangguran sebesar 4,88 persen. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak punya pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.⁹

Tingginya angka pengangguran terbuka di Jawa Timur ini

⁸ Ibid., hlm. 6

⁹ Badan Pusat Statistika Provinis Jawa Timur, 2024

menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang terserap oleh sektor industri ini masih sedikit atau lapangan pekerjaan lebih sedikit dengan jumlah orang yang mencari kerja. Dengan kata lain, ada lebih banyak angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai.

Usaha dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja itu tidak lepas dari beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi di Jawa Timur diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengakibatkan pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia dan khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, melakukan reformasi terkait masalah ketenagakerjaan. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang ada, dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran..¹⁰

Salah satu langkah yang diperlukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan memperbaiki tingkat upah yang diterima oleh masyarakat melalui kebijakan upah minimum. Dengan menerapkan kebijakan upah minimum, pemerintah berupaya untuk meningkatkan angka pendapatan per individu bagi para pekerja,

¹⁰ Ika Rahmawati, *Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur*, E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Vol. VII No. 1, 2020, hlm. 3

sehingga dapat meningkatkan secara keseluruhan tingkat upah para tenaga kerja.¹¹ Melalui Teori Klasik yang menyatakan bahwa upah yang lebih tinggi mengundang pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan akan makanan naik sehingga produsen perlu menambah produksinya yaitu dengan menambah jumlah tenaga kerja sebagai pengelola produksi yang dapat dihasilkan.¹²

Hal ini disebabkan karena jika upah mengalami kenaikan maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan daya beli masyarakat juga akan meningkat sehingga permintaan akan barang dan jasa itu semakin banyak. Meningkatnya permintaan dari masyarakat mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Upah merupakan imbalan yang diberikan kepada seseorang atas hasil kerja yang mereka lakukan untuk perusahaan. Peningkatan upah biasanya ditandai oleh pertumbuhan permintaan akan barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan produksi. Hal ini juga dapat mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja di perusahaan. Meskipun peningkatan upah dapat membuka peluang kerja baru melalui peningkatan konsumsi, namun dalam beberapa kasus, kenaikan upah juga dapat memiliki dampak negatif terhadap penyerapan

¹¹ Iksan, Arifin, Wahyudi, *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 43

¹² M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 225

tenaga kerja yaitu salah satunya dengan pengurangan karyawan.¹³ Berikut ini adalah data perkembangan upah minimum kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023

Tabel 1. 4
Jumlah UMK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023 (Rupiah)

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	1.508.894.80
2.	2019	1.630.59.05
3.	2020	1.768.777.00
4.	2021	1.868.777.08
5.	2022	1.891.567.12
6.	2023	2.040.244.30

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur

Dari data diatas dapat dilihat perkembangan upah minimum pada Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah umk tertinggi yaitu mencapai 2.040.244. Faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya upah minimum salah satunya karena pertumbuhan ekonomi, biaya hidup dan produktivitas tenaga kerja. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang

¹³ Atifatur, R & Arfida, B.R, *Analisis tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri di kabupaten gresik*. Jurnal Ekonomi Pembangunan vol. 2, 2018, hlm. 74-82.

dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect.¹⁴

Selain upah minimum, beberapa aspek lain juga menjadi fokus pemerintah dalam upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan, yaitu meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor dalam suatu daerah dalam periode waktu tertentu. PDRB memiliki potensi untuk mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia, dengan asumsi bahwa peningkatan nilai PDRB dapat mengakibatkan peningkatan nilai tambah output atau penjualan di seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah.¹⁵ PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.¹⁶

Menurut Teori Lewis, semua sektor ekonomi harus tumbuh serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian, salah satu caranya adalah dengan mengalihkan kelebihan tenaga

¹⁴ Nyoman Utama, dkk. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 7 No 3, 2019, hlm. 283

¹⁵ Febryana rizqi wasilaputri, *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pdrb Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 244-245

¹⁶ Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 79

kerja di sektor pertanian ke sektor industri, dalam keadaan demikian, maka peranan pertumbuhan ekonomi mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja bersumber dari adanya ekspansi pada kegiatan sektor berlingkup modern.¹⁷ Hubungan jumlah pendapatan perkapita industri dan produk domestik regional bruto adalah Peningkatan pendapatan perkapita industri secara langsung berkontribusi pada peningkatan PDRRB, karena industri adalah salah satu sektor penting yang menyumbang PDRB. Ini karena peningkatan pendapatan pekerja industri meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor lain dan pada akhirnya meningkatkan PDRRB. Dapat dilihat data PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 – 2022 berdasarkan ADHK

Tabel 1. 5
Jumlah PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023 (Miliar)

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	1.563.441,8
2.	2019	1.649.895,6
3.	2020	1.611.392,6
4.	2021	1.668.749,4
5.	2022	1.757.821,4
6.	2023	1.844.808,6

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur

Data diatas dapat dilihat bahwa jumlah PDRB ADHK itu mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2018 PDRB ADHK di

¹⁷ Emi Suwarni, *Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 4 No.1,2006, hlm. 22

provinsi Jawa Timur itu mencapai 1.563.441 sampai pada tahun 2023 PDRB ADHK itu mencapai 1.844.808,6

Salah satu strategi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah melalui investasi. Investasi adalah tindakan menanamkan modal yang digunakan untuk membiayai dan memperoleh barang modal serta perlengkapan produksi guna digunakan dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Bertambahnya jumlah barang modal dapat meningkatkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Modal tersebut dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, yang pada gilirannya dapat menghasilkan surplus yang lebih besar.¹⁸

Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu faktor utama dalam menyerap tenaga kerja. Tingginya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh ekspansi lapangan kerja, yang menekankan pentingnya penanaman modal (investasi). Menurut teori Harrod-Domar, dengan adanya penambahan peralatan-peralatan produksi dapat memperbesar kapasitas produksi sehingga akan berdampak pada penambahan tenaga kerja.¹⁹ Peralatan produksi yang baru dan lebih baik memungkinkan pekerja untuk menghasilkan lebih banyak output dalam waktu yang sama. Hal ini meningkatkan produktivitas tenaga kerja, namun disisi lain penambahan

¹⁸ Widyapangesti, Soelistyo, *Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa*, Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 124

¹⁹ Siti Safi'atul Ummah, Ach. Yasin, *The Relationship Of Minimum Wage, Investment, Gdrp, And Technology Index On Indonesian Labor Absorption*, Jiet (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 84

peralatan produksi itu bisa menyebabkan perusahaan membutuhkan lebih sedikit pekerja untuk menghasilkan tingkat output yang sama.

Berikut ini adalah tabel investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dalam bentuk milyar rupiah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2023

Tabel 1. 6
Investasi PMDN Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022(Miliar)

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	33.333,1
2.	2019	45.452,7
3.	2020	55.660,6
4.	2021	52.552,2
5.	2022	65.355,9
6.	2023	74.937,4

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur

Dapat dilihat dari tabel diatas investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) tiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2018 – 2023. Namun pada tahun 2021 investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) mengalami sedikit penurunan menjadi 52.552,2. Namun pada tahun selanjutnya Investasi PMDN mengalami peningkatan sampai tahun 2023 mencapai 74.937,4

Selain investasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang. UNDP menciptakan

indeks pembangunan manusia sebagai tanggapan terhadap tuntutan untuk indikator yang dapat menunjukkan sejauh mana suatu negara telah menggunakan sumber daya yang dimiliki penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia di daerah tersebut. Apabila mutu kehidupan setiap negara dapat ditingkatkan, kesejahteraan diharapkan.²⁰

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa elemen kualitas hidup dasar yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan seseorang. Keterampilan dan kesehatan adalah komponen utama dari Indeks Pembangunan Manusia. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tingkat kualitas hidup manusia yang lebih tinggi akan mendorong produksi barang dan jasa yang lebih tinggi, dan tingkat IPM yang lebih tinggi akan berdampak pada tenaga kerja dalam mencari pekerjaan.²¹ Berikut ini tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2018-2022.

²⁰ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*, (Jakarta : INDOCAMP, 2018), hlm.8-19

²¹ Dwi Mahroji, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten*, *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, Vol. 9, No. 2019, hlm. 56

Tabel 1. 7
Jumlah IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	70.77
2.	2019	71.50
3.	2020	71.71
4.	2021	72.14
5.	2022	72.75
6.	2023	73.38

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur

Dapat dilihat dari tabel diatas Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018 yang jumlah 70,77 sampai tahun 2023 mencapai 73,38. Walaupun jumlah kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Dari pembahasan diatas yang telah dipaparkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh upah minimum kabupaten/kota, PDRB, dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur Pada Tahun 2018-2023”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB, Investasi dan IPM berpengaruh simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur ?

2. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur ?
4. Apakah Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur ?
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB, Investasi dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Untuk memudahkan pencapaian tujuan, maka peneliti mempunyai tujuan dari sub masalahnya yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah ada pengaruh secara positif signifikan Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB, Investasi, dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah ada pengaruh secara positif signifikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah ada pengaruh secara positif signifikan Produk Domestik Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.

4. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah ada pengaruh positif signifikan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah ada pengaruh positif signifikan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat didefinisikan beberapa masalahantara lain :

1. Besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahun walaupun besarnya di setiap Kabupaten/Kota berbeda
2. Laju pertumbuhan PDRB di Jawa Timur mengalami naik turun tetapi pada saat tahun 2020 mengalami penurunan.
3. Besaran jumlah Investasi di Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan investasi akan memperluas kesempatan kerja sehingga akan menyerapsumber daya manusia yang lebih banyak.
4. Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan setiap tahunnya
5. Jumlah penduduk di Jawa Timur mengalami naik turun setiap tahunnya.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti memberikan batasan pada penelitian ini. Batasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek yang digunakan penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur
2. Tahun penelitian yang akan diteliti yaitu data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2023
3. Pada penelitian ini dibatasi dengan variabel X_1 (Upah Minimum Kabupaten/kota), X_2 (Produk Domestik Regional Bruto), X_3 (Investasi), X_4 (Indeks Pembangunan Manusia) variabel Y (Tenaga Kerja)

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yangterkait atau membutuhkan informasi dan data yang terkait dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam masalah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Dan diharapkan dapat memperkaya ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan teori penyerapan tenaga kerja. Sertadapat membantu memberikan informasi bagi peneliti yang lainnya yang masih mempunyai keterikatan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pemenuhan penyerapan tenaga kerja khususnya di wilayah Jawa Timur dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di wilayah Jawa Timur.

b. Bagi Mahasiswa

Dalam hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan untuk kerangka berpikir dalam pembuatan penelitian kedepannya. Khusus yang terkait dengan Pengaruh Upah Minimum, PDRB, Investasi, Dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat terkait apa saja faktor faktor yang dapat mempengaruhi tenaga kerja di provinsi Jawa Timur dan bisa digunakan sebagai bahan untuk mengatasi masalah tenaga kerja.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan sumber informasi maupun bisa menjadi fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai pihak yang hendak melaksanakan penelitian,

terutama pada jalur ekonomi.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi atau kesalah Pahaman yang berbeda beda dan mempermudah pembaca dalam memahami dan menelaah pokok permasalahan, maka akan diuraikan penjelasan beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini.

Adapun istilah istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Definisi Konseptual

a. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja yang bekerja di perusahaannya. Para pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandang sebagai sarana meningkatkan pendapatan para pekerja miskin. Meskipun para pendukung upah minimum mengakui kebijakan itu menyebabkan pengangguran bagi sebagian pekerja, namun mereka berpendapat bahwa pengorbanan ini setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lain.²²

Dasar hukum pemberian upah bagi tenaga kerja antara lain adalah:

- 1) Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003.
- 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

²² Andi Nurahman Ramadani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah 2014-2019*, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Vol. 23 No 2, 2021, hlm. 21

KEP.102/MEN/VI/2004: Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.²³

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu baik oleh atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Definisi PDRB menurut Bank Indonesia adalah “jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah”. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Hasil perhitungan PDRB disajikan atas harga dasar harga berlaku dan harga konstan: 1) Perhitungan atas harga berlaku dan 2) Perhitungan atas dasar harga konstan.²⁴

c. Investasi

Investasi merupakan pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal (perusahaan) untuk membeli barang-

²³ Ovi Meilina Tyas Savitri, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*, Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 16 No. 2, 2019, hlm. 63

²⁴ Mohammad Ilham, *Pengaruh Upah, Investasi Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus Kabupaten Pasuruan)*, Journal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2016, Vol 4 No. 2, hlm. 6

barang modal dan perlengkapan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama telah aus dan perlu didepresiasi.²⁵

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang.²⁶ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa elemen kualitas hidup dasar yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan seseorang.²⁷

e. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sector atau unit usaha tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa

²⁵ Devi Rizky Vitalia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Semarang*, Journal Ilmiah FEB UINDIP, 2014, hlm. 23

²⁶ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*, (Jakarta : INDOCAMP, 2018), hlm.8-19

²⁷ Dwi Mahroji, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten*, Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi), Vol. 9, No. 2019, hlm. 56

penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang dikerjakan dalam suatu unit usaha. Menurut Badan Pusat Statistik penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di semua sektor ekonomi.²⁸

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini menggunakan judul “ Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur. Dimana penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana besarnya upah minimum kabupaten/kota, PDRB, dan Investasi ini dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di wilayah Jawa Timur.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami, maka peneliti membuat sistematika penulisan skripsi sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan yang terdiri menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul, halaman judul, persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak. Pada bagian inti skripsi terdiri dari:

²⁸ Riky Eka Putra, *Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 45

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini sebagaimana pada penelitian yang ada pada umumnya. Di mana bab satu adalah pendahuluan yang di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) manfaat penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, serta (h) sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini merupakan landasan teori. Di mana bab dua ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) kajian teoritis, (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, dan (d) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

ada bab ketiga dalam penelitian ini merupakan metode penelitian. Di mana bab tiga ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel penelitian dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, serta (e) teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian. Di mana pada bab empat ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) hasil penelitian, dan (b) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab kelima dalam penelitian ini merupakan pembahasan. Di mana pada bab lima ini di dalamnya mencakup uraian mengenai pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab keenam dalam penelitian ini merupakan bagian penutup yang menjadi akhir dari penelitian. Di mana pada bab enam ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) kesimpulan dan (b) saran. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran yang ditujukan oleh peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.